

LAPORAN
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PADA PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani Instansi Pemerintah



TRIWULAN II
APRIL - JUNI
TAHUN 2026

LEMBAR PENGESAHAN

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN SURVEI
SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGUNA LAYANAN PENGADILAN
DI PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL
GRESIK KELAS IA

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Borikrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan evaluasi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi bersih dan Melayani Instansi Pemerintah

Disahkan di Gresik
Pada Hari Rabu, 1 Juli 2026

Koordinator Tim Survei



ZULVIKAR NUR BARLIAN., S.H.
NIP. 198602062012121001

Penanggungjawab Survei



SYAWAL ASWAD SIREGAR, S.H., M.Hum.
NIP.197211121994031002

Mengetahui,
Ketua Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik



ACHMAD RIFAI, S.H., M.H.
196807071996031002

KATA PENGANTAR

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani satuan kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada amanah Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya Indeks Persepsi Anti Korupsi yang menjadi parameter pemerintahan yang bersih dan melayani.

Kebijakan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan harus dilaksanakan secara konsisten dengan memperhatikan kebutuhan dan harapan masyarakat, sehingga pelayanan pemerintah kepada masyarakat dapat selalu diberikan secara cepat, tepat, murah, terbuka, sederhana dan mudah dilaksanakan serta tidak diskriminatif. Oleh karena itu, upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat merupakan kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus dan berkelanjutan oleh semua jajaran aparatur negara pada semua tingkatan.

Sebagai pertanggungjawaban atas kinerja Tim Survei, maka disusun Laporan ini yang dimaksudkan untuk memberikan informasi bahwa Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang bersih dari korupsi.

Semoga hasil survei ini dapat membantu memberikan masukan yang positif bagi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA dan sekaligus menjadi acuan untuk meningkatkan pelayanan bagi pengguna layanan pengadilan serta sebagai bahan untuk mengevaluasi kinerja agar dapat melaksanakan kinerja kedepan secara lebih efektif dan efisien.

Gresik, 1 Juli 2026

Koordinator Tim Survei



ZULVIKAR NUR BARLIAN, S.H.
NIP. 198602062012121001

DAFTAR ISI

LAPORAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)..... i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

KATA PENGANTAR..... iii

DAFTAR ISI..... iv

BAB I PENDAHULUAN1

 A. Latar Belakang.....1

 B. Maksud Dan Tujuan.....1

 C. Landasan Hukum1

 D. Tahapan Pelaksanaan.....3

 E. Teknik Survei3

BAB II METODOLOGI4

 A. Metode Penelitian4

 B. Populasi Dan Sampel.....4

 C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis4

 D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control4

 E. Teknik Analisis Data5

 F. Tahapan Pelaksanaan.....5

BAB III PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI8

 A. Indeks Total8

 B. Data Umum Responden8

 C. Data Domisili Responden10

 D. Data Umur Responden10

 E. Data Layanan11

 F. Nilai Per-Unsur11

BAB IV HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI PENGGUNA LAYANAN
 PENGADILAN.....13

 A. Hasil Penilaian Masing-Masing Ruang Lingkup13

 B. Evaluasi Nilai Unsur.....14

BAB IV PENUTUP15

 A. Kesimpulan.....15

 B. Rekomendasi15

LAMPIRAN-LAMPIRAN.....

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

C. Landasan Hukum

Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA didasarkan pada aturan dan ketentuan sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
6. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
7. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
12. SK KMA RI No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan;
13. SK KMA RI No. 026/KMA/SK/I/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan;
14. Peraturan Menpan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;
15. Peraturan Menpan-RB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menpan-RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menpan-RB Nomor 26 Tahun 2020 tentang Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
17. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum MARI Nomor 520/DJU/PS.02//4/2016 tentang Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.
18. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1230/DJU/SK/HM.02.3/4/2021 tentang Pemberlakuan Aplikasi Layanan Elektronik Terpadu (Lentera), Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) dan Aplikasi Pengawasan Elektronik Eksekusi (PERKUSI) di Lingkungan Peradilan Umum;
19. SK Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1365/DJU/SK/HM.02.3/5/2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Survei dan

Tata Cara Penggunaan Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum dan Peradilan Dibawahnya.

D. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

E. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat: <http://esurvey.badilum.mahkamahagung.go.id>

BAB II

METODOLOGI

A. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

B. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

C. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

D. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu tiga bulan melalui aplikasi survei elektronik SISUPER. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membantu responden saat melakukan pengisian survei melalui perangkat elektronik komputer layar sentuh di ruang PTSP Pengadilan Negeri /

Hubungan Industrial Gresik Kelas IA, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik analisis deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a. **Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.
- b. Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.
- c. Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin **BERSIH DARI KORUPSI**.

F. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan survei indeks Persepsi Anti Korupsi (IPK) di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyusun Instrumen Survei;
2. Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
3. Menentukan responden;
4. Melakukan survei;
5. Menyajikan dan melaporkan hasil.

Gambar 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel 1

Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

Tabel 2
Nilai Persepsi

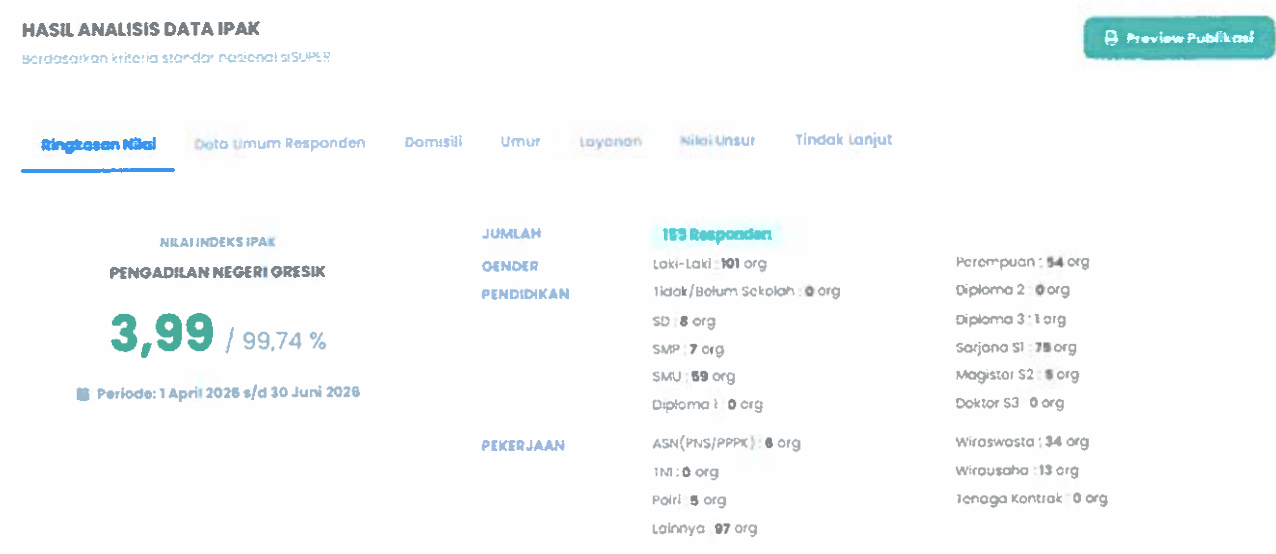
Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25.00 – 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III

PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI

Perhitungan data survei telah dilakukan secara otomatis pada aplikasi survei elektronik (SISUPER). Berikut adalah data yang telah terkumpul dan diunduh melalui aplikasi SISUPER dengan log in sebagai admin survei Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

A. Indeks Total



1. Jenis Kelamin

Tabel 3
Responden Menurut Karakteristik Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Frekuensi	%
1	Laki-laki	101	65,16%
2	Perempuan	54	34,84%
Jumlah		155	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berjenis kelamin **LAKI-LAKI (65,16%)**.

2. Pendidikan Terakhir

Tabel 4
Responden Menurut Karakteristik Pendidikan Terakhir

No	Pendidikan Terakhir	Frekuensi	%
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	8	5,16%
3	SMP	7	4,52%
4	SLTA	59	38,06%
5	Diploma 1	0	0%
6	Diploma 2	0	0%
7	Diploma 3	1	0,65%
8	S1	75	48,39%
9	S2	5	3,23%
10	S3	0	0%
Jumlah		155	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini berpendidikan terakhir **S1 (48,39%)**.

3. Pekerjaan

Tabel 5
Responden Menurut Karakteristik Pekerjaan Utama

No	Pekerjaan Utama	Frekuensi	%
1	PNS	6	3,87%
2	TNI	0	0%
3	Polri	5	3,23%
4	Swasta	34	21,94%

5	Wirausaha	13	8,39%
6	Tenaga Kontrak	0	0%
7	Lainnya	97	62,58%
Jumlah		15	100%

Berdasarkan tabel responden menurut karakteristik di atas mayoritas responden pada penelitian ini pekerjaan utama **Lainnya (62,58%)**.

C. Data Domisili Responden

Cari:

NO	DAERAH DOMISILI	JUMLAH
1	JAMBI	1 Orang
2	DKI JAKARTA	1 Orang
3	JAWA TIMUR	151 Orang
4	BALI	2 Orang

Berdasarkan hasil rekam data pada aplikasi survei elektronik SISUPER, diketahui bahwa dari 155 orang responden, mayoritas pengguna layanan berdomisili di **Jawa Timur** dengan total jumlah **151 Orang**.

D. Data Umur Responden

Cari:

KATEGORI UMUR	JUMLAH	PERSENTASE (%)
18 - 28 Tahun	29 Orang	18,83 %
29 - 39 Tahun	47 Orang	30,52 %
40 - 49 Tahun	50 Orang	32,47 %
50 - 59 Tahun	18 Orang	11,69 %
60 - 69 Tahun	10 Orang	6,49 %

Berdasarkan hasil rekam data umur responden pada aplikasi survei elektronik SISUPER, umur/usia responden paling banyak adalah **40 - 49 Tahun** sebanyak **32,47%**.

E. Data Layanan

Cari:			
NO	LAYANAN SATKER	TOTAL PEMOHON	
1	Layanan Pidana	10 Org	
2	Layanan Perdata	32 Org	
3	Layanan Hukum / Informasi	50 Org	
4	Layanan Administrasi Umum	36 Org	
5	Layanan PHI	13 Org	
6	Layanan e-Court	14 Org	

Berdasarkan hasil rekam data layanan yang diterima responden pada aplikasi survei elektronik SISUPER, penilaian layanan paling banyak yaitu pada Layanan Hukum/Informasi sebanyak 50 Orang.

F. Nilai Per-Unsur

Cari:											
NILAI INDEKS	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	TOTAL
Jumlah Nilai per Unsur	618	619	618	618	618	619	618	619	619	618	
NRR per Unsur	3,987	3,994	3,987	3,987	3,987	3,994	3,987	3,994	3,994	3,987	39,897
NRR Tertimbang	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	0,399	3,990

Berdasarkan hasil rekam data penilaian masing-masing unsur pada Survei Anti Korupsi melalui aplikasi survei elektronik SISUPER, maka dapat diketahui nilai dari masing masing ruang lingkup penilaian adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penilaian Masing-Masing Unsur Penilaian

No.	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,987	Bersih dari Korupsi	4
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,994	Bersih dari Korupsi	1

3.	Menjual Pengaruh	3,987	Bersih dari Korupsi	5
4.	Transparansi Biaya	3,987	Bersih dari Korupsi	6
5.	Transaksi Rahasia	3,987	Bersih dari Korupsi	7
6.	Hadiah	3,994	Bersih dari Korupsi	2
7.	Transparansi Pembayaran	3,987	Bersih dari Korupsi	8
8.	Percaloan	3,986	Bersih dari Korupsi	10
9.	KKN	3,994	Bersih dari Korupsi	3
10.	Perbuatan Curang	3,987	Bersih dari Korupsi	9

BAB IV
HASIL SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN

Hasil olah data survei Indeks Persepsi Korupsi Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik pada Triwulan II Tahun 2025 yang dilakukan melalui aplikasi survei elektronik SISUPER dengan 155 responden diperoleh nilai indeks sebesar **3,99** dan berada pada kategori **“Bersih dari Korupsi”** (pada interval **3.26 s/d 4.00**). Hasil tersebut masih berada di bawah sasaran mutu Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA.

A. Hasil Penilaian Masing-Masing Ruang Lingkup

Penilaian Indeks Persepsi Korupsi terdiri dari 10 (sepuluh) ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap 10 (sembilan) ruang lingkup tersebut.

Tabel 7
Rata-rata Skor dan Peringkat pada Setiap Ruang Lingkup
Pengukuran Indeks Persepsi Korupsi
di Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

No.	Ruang Lingkup	Rata-Rata Skor	Kategori	Peringkat
1.	Manipulasi Peraturan	3,987	Bersih dari Korupsi	4
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3,994	Bersih dari Korupsi	1
3.	Menjual Pengaruh	3,987	Bersih dari Korupsi	5
4.	Transparansi Biaya	3,987	Bersih dari Korupsi	6
5.	Transaksi Rahasia	3,987	Bersih dari Korupsi	7
6.	Hadiah	3,994	Bersih dari Korupsi	2
7.	Transparansi Pembayaran	3,987	Bersih dari Korupsi	8
8.	Percaloan	3,986	Bersih dari Korupsi	10
9.	KKN	3,994	Bersih dari Korupsi	3
10.	Perbuatan Curang	3,987	Bersih dari Korupsi	9

Tabel 8
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada
Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

B. Evaluasi Nilai Unsur

1. Unsur Tertinggi

Berdasarkan penilaian masing-masing unsur SPAK, unsur paling tinggi berada pada ruang lingkup “Penyalahgunaan Jabatan”, “Praktek KKN” dan “Praktek Percaloan”.

↑ 3 UNSUR TERTINGGI

Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu ?	3.99
Apakah pernah melihat dan atau mendengar masih terjadi praktek KKN di Pengadilan ?	3.99
Apakah pernah mengetahui ada praktek percaloan dalam pengurusan layanan di Pengadilan ?	3.99

2. Unsur Terendah

Berdasarkan penilaian masing-masing unsur SPAK, unsur paling rendah berada pada ruang lingkup “Transparansi Pembayaran”, “Perbuatan Curang”, dan “Manipulasi Peraturan”.

↓ 3 UNSUR TERENDAH

Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan dilakukan ?	3.99
Apakah pernah mengurus perkara melalui Hakim / Panitera / Staff Pengadilan diluar persidangan ?	3.99
Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?	3.99

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Triwulan II Tahun 2026 diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,99 / 99,74%** atau masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**. Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks **3,987**.
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks **3,994**.
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks **3,987**.
4. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks **3,987**.
5. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks **3,987**.
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks **3,994**.
7. Indikator Transparansi Pembayaran, mendapat indeks **3,987**.
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks **3,994**.
9. Indikator KKN, mendapat indeks **3,994**.
10. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks **3,987**.

B. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri / Hubungan Industrial Gresik Kelas IA Triwulan II Tahun 2026 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas **3,99 / 99,74%** atau masuk pada persepsi **BERSIH DARI KORUPSI**. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **“Transparansi Pembayaran”, “Perbuatan Curang”, dan “Manipulasi Peraturan”** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya.

LAMPIRAN - LAMPIRAN

**JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN
SURVEY PRESEPSI ANTI KORUPSI (SPAK)
PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL GRESIK KELAS IA
TAHUN 2026**

No.	Kegiatan/ Responden	Bulan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des
1	Pelaksanaan Survei Triwulan I												
2	Pembuatan Indeks, Pembuatan Laporan, dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan I												
3	Monev dan Tindaklanjut Survei Triwulan I												
4	Pelaksanaan Survei Triwulan II												
5	Pembuatan Indeks, Pembuatan Laporan, dan Publikasi Pelaksanaan Survei Triwulan II												
6	Monev dan Tindaklanjut Survei Triwulan II												

[illegible]

Daftar Pertanyaan/ Kuesioner pada Aplikasi Survei Elektronik (SISUPER)

1. Data Responden



siSUPER

PERSEPSI ANTI KORUPSI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

1. Data Responden

NAMA LENGKAP

RENDOKUN *

Tulis nama atau nama...

Pilih Dgn...

UMUR Dgn: Wkt *

JENIS KELAMIN *

Ketik umur...

Pilih Dgn...

NOMOR WHATSAPP *

IGAMALIT

Contoh: 081234567890

Pilih Dgn...

PERUMAHAN *

Pilih Dgn...

LANJUTKAN →

2. Layanan yang Dinilai



siSUPER

PERSEPSI ANTI KORUPSI

SPAK - SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Bantu kami meningkatkan kualitas pelayanan melalui survei ini.

1

2

3

4

2. Informasi Layanan

JENIS LAYANAN YANG DITERIMA *

Pilih Dgn...

PERUMAHAN KELOMPOK LAYANAN TERIMA LAYANAN *

Pilih Dgn...

← KEMBALI

LANJUTKAN →

3. Form Kuesioner



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku?

Tidak Sesuai Prosedur Sesuai Prosedur Sangat Sesuai Prosedur Tidak Sesuai Prosedur

➡ KEMBALAH



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

5. Apakah di Pengadilan telah membayar sesuai tarif resmi tanpa ada biaya tambahan?

Tidak Resmi Resmi Sangat Resmi Tidak Resmi

➡ KEMBALAH



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu?

Petugas meminta imbalan tertentu tidak ada Petugas meminta imbalan tertentu ada Petugas meminta imbalan tertentu tidak ada Petugas meminta imbalan tertentu ada

➡ KEMBALAH



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

6. Apakah memberikan tanda terima kasih atas layanan yang diterima di Pengadilan (meskipun tidak diminta)?

Tidak Ya Sangat Ya Tidak Ya

➡ KEMBALAH



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

3. Pernahkah dituntangi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara?

Tidak Ya Sangat Ya Tidak Ya

➡ KEMBALAH



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

7. Apakah menerima bukti transaksi keuangan / pembayaran yang sah setelah proses pembayaran di Pengadilan ditabukan? (Untuk pelayanan yang dipangkas biaya / PANGBP)

Tidak Resmi Resmi Sangat Resmi Tidak Resmi

➡ KEMBALAH



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

4. Apakah selalu mudah dalam mendapatkan informasi tentang tarif/biaya baik melalui website ataupun petugas layanan di Pengadilan?

Tidak Mudah Sangat Mudah Tidak Mudah Sangat Mudah

➡ KEMBALAH



SI-SUPER SURVEY PENGADUAN ANTI KORUPSI

Penilaian Anda

Survei ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap layanan Pengadilan.

3. Penilaian Indikator

8. Apakah pernah mengetahui ada praktik percakutan dalam pengurusan layanan di Pengadilan?

Tidak Ya Sangat Ya Tidak Ya

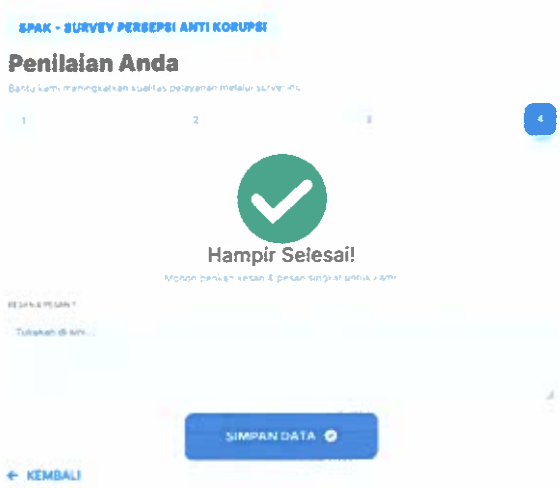
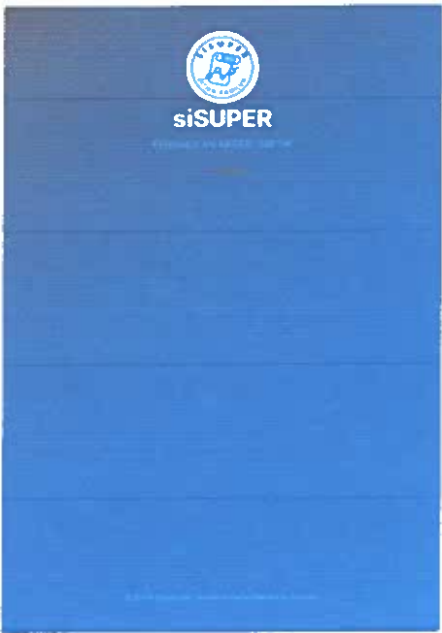
➡ KEMBALAH

Analisis Data Survei Elektronik SISUPER

[illegible]



4. Kritik & Saran



[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]